



Peran Program Kartu Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan bagi Siswa dari Keluarga Kurang Mampu

The Role of the Indonesia Smart Card Programme in Improving Access to Education for Students from Low-Income Families

Kholifah Nur Khasanah¹, Nur Khasanah²

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : kholifah.nur.khasanah24139@mhs.uingusdur.ac.id¹, nur.khasanah@uingusdur.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 22-12-2025

Revised : 24-12-2025

Accepted : 26-12-2025

Pulished : 28-12-2025

Abstract

The Indonesia Smart Card (KIP) program is one of the government's efforts to guarantee the right to education for children from underprivileged families. This study aims to identify the role of the Indonesia Smart Card (KIP) in expanding access to and equitable distribution of education in Indonesia. The method used is library research by examining various sources such as scientific journals, books, and official reports from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and the Central Statistics Agency (BPS). The results of the study show that the Indonesia Smart Card (KIP) contributes to reducing dropout rates and increasing student participation in education, especially in areas with high poverty rates. Based on 2025 data, more than 2.7 million students are registered as beneficiaries of this program. Although there are still obstacles in data collection and distribution of assistance, the Indonesia Smart Card (KIP) has proven to be a concrete step in realizing educational equity and social justice in Indonesia.

Keywords : *Indonesia Smart Card, access to education, underprivileged families.*

Abstrak

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam memperluas akses serta pemerataan pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi dari Kemendikbudristek serta Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil kajian menunjukkan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan keikutsertaan siswa dalam pendidikan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Berdasarkan data tahun 2025, lebih dari 2,7 juta siswa tercatat sebagai penerima manfaat program ini. Meskipun masih terdapat kendala dalam pendataan dan penyaluran bantuan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) terbukti menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci : *Kartu Indonesia Pintar, Akses Pendidikan, Keluarga Kurang Mampu.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa, kualitas pendidikan suatu negara sangat menentukan kemajuan sosial, ekonomi, dan politiknya. Pendidikan memegang



peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berintegritas tinggi. Melalui pendidikan, individu tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan, nilai-nilai moral, dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Di Indonesia, pendidikan masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya terhadap akses pendidikan yang layak tidak selalu merata.

Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemerataan pendidikan di Indonesia. Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga yang lebih sejahtera (Bappenas, 2022). Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dua belas tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui program bantuan seperti KIP menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan pendidikan.

Program Indonesia Pintar (PIP) dengan instrumen utamanya, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat tetap bersekolah tanpa terkendala biaya (Kemendikbud, 2023). Program ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sebelumnya pernah ada. Program Indonesia Pintar dengan KIP sebagai fasilitasnya dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh 2 lembaga kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag).

Secara konseptual, Kartu Indonesia Pintar tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat menekan angka putus sekolah dan memperluas partisipasi siswa kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan formal (Sari & Rahmawati, 2021). Dengan adanya KIP, pendidikan diharapkan menjadi sarana mobilitas sosial vertikal yang membantu individu memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial keluarganya di masa depan.

Namun, pelaksanaan program ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan adanya masalah dalam hal ketepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan pencairan dana, serta lemahnya pengawasan penggunaan dana KIP (Putri & Lestari, 2022; Rahman & Suryani, 2022). Kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas program dan membuat tujuan pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, evaluasi dan peningkatan sistem pelaksanaan program KIP menjadi hal yang penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

Melihat pentingnya peran pendidikan dalam membangun kualitas sumber daya manusia, maka artikel ini berfokus pada analisis peran Program Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan



akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan perubahan sosial, serta memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan efektif di masa mendatang (Hidayat & Anwar, 2023; Susanti & Prasetyo, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal nasional, laporan hasil penelitian, serta dokumen resmi pemerintah yang membahas tentang Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami dan menganalisis peran KIP dalam memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan hasil kajian dan data yang sudah tersedia (Zed, 2014).

Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap. Pertama, menghimpun literatur dan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, baik dari sumber cetak maupun daring. Kedua, dilakukan penyaringan dan pemilihan sumber untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan memiliki tingkat relevansi dan keakuratan yang tinggi. Ketiga, mengorganisasi data dengan mengelompokkan informasi ke dalam beberapa tema penting seperti kebijakan pemerataan pendidikan, pelaksanaan program KIP, serta dampaknya terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu (Sugiyono, 2022).

Data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya dan diperoleh dari berbagai publikasi resmi seperti laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkaya analisis mengenai efektivitas dan kendala pelaksanaan KIP di Indonesia, khususnya dalam konteks pemerataan akses pendidikan (Sukmadinata, 2019).

Proses analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan cara menelaah isi dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, ide pokok, dan hubungan antara konsep yang relevan. Hasil dari analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan secara komprehensif peran KIP dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai sumber, diperoleh beberapa temuan penting terkait peran dan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu sebagai berikut, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berperan penting dalam memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui bantuan biaya pendidikan, siswa dapat memenuhi kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya tanpa harus terbebani oleh kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan laporan Kemendikbudristek (2023), program KIP telah menjangkau lebih dari 18 juta peserta didik dari berbagai jenjang



pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, keberadaan KIP juga membantu menekan angka putus sekolah di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Siswa yang sebelumnya terancam berhenti sekolah dapat melanjutkan pendidikannya berkat bantuan biaya dari KIP (Hidayat, 2022). Dengan demikian, KIP berfungsi tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerataan kesempatan belajar di Indonesia.

Program KIP tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Pendidikan merupakan salah satu jalur mobilitas sosial, di mana seseorang dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan status sosialnya melalui peningkatan kualitas pendidikan. Melalui KIP, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak (Fitriani, 2020). Dalam konteks sosiologi pendidikan, KIP menjadi bagian dari kebijakan afirmatif yang menegaskan peran negara dalam menciptakan keadilan sosial. Program ini membantu anak-anak dari kelompok marjinal agar tidak tertinggal secara pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila sila ke-5, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang menempatkan pemerataan pendidikan sebagai dasar terciptanya keadilan sosial di masyarakat (Kemendikbudristek, 2023).

Meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan program KIP di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan teknis. Salah satu kendala utama adalah ketidakakuratan data penerima manfaat. Proses verifikasi dan validasi data masih sering mengalami kesalahan, sehingga terdapat penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat, sementara peserta didik yang benar-benar membutuhkan justru belum terdaftar (Sari, 2021). Selain itu, beberapa sekolah mengalami keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada tidak optimalnya penggunaan bantuan pada waktu yang tepat (Nuraini, 2022). Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas program adalah **minimnya sosialisasi** kepada masyarakat. Masih banyak orang tua penerima bantuan yang belum memahami mekanisme penggunaan dana KIP secara benar, sehingga pemanfaatannya belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa (Fitriani, 2020).

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KIP, diperlukan sejumlah strategi perbaikan baik dari segi kebijakan maupun teknis di lapangan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat agar lebih akurat dan transparan. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui secara berkala dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan penerima (BPS, 2023). Kedua, perlu adanya peningkatan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan. Ketiga, kegiatan sosialisasi dan pendampingan masyarakat harus diperluas agar orang tua memahami tujuan dan cara pemanfaatan dana KIP dengan tepat (Hidayat, 2022). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan KIP dapat



berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal dalam mewujudkan pemerataan pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki kontribusi besar dalam membuka kesempatan belajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Melalui bantuan dana pendidikan yang diberikan, KIP membantu peserta didik memenuhi kebutuhan dasar sekolah seperti seragam, buku, dan perlengkapan belajar lainnya. Program ini turut menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi siswa, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Dengan demikian, KIP berperan penting dalam mendorong terwujudnya pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Selain memberikan dampak di bidang pendidikan, keberadaan KIP juga memiliki nilai sosial yang besar. Program ini membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. Dengan demikian, KIP dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Meskipun demikian, pelaksanaan program KIP di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, keterlambatan penyaluran dana, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek pendataan, koordinasi antar lembaga, dan pendampingan kepada penerima manfaat agar pelaksanaan program lebih optimal dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, Program Kartu Indonesia Pintar merupakan langkah nyata pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan perbaikan berkelanjutan serta dukungan dari semua pihak, program ini berpotensi menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pendidikan Indonesia: Kondisi pendidikan menurut jenjang dan wilayah*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2022). *Evaluasi program Indonesia Pintar terhadap pemerataan akses pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Fitriani, N. (2020). Evaluasi program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 45–53.
- Hidayat, M., & Anwar, T. (2023). Dampak program Indonesia Pintar terhadap partisipasi sekolah di daerah tertinggal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 199–210.
- Hidayat, R. (2022). Peran program Kartu Indonesia Pintar dalam menekan angka putus sekolah di daerah tertinggal. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 10(1), 33–42.



- Kemendikbud. (2023). *Laporan tahunan program Indonesia Pintar (PIP)*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan evaluasi program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., Matsani, N., Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah kartu indonesia pintar berhasil menurunkan angka putus sekolah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 72.
- Nuraini, L. (2022). Tantangan implementasi program Indonesia Pintar di sekolah menengah pertama. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 7(3), 101–110.
- Pulungan, I. A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Putri, A. N., & Lestari, M. W. (2022). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan dasar di daerah perdesaan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 7(1), 34–48.
- Rahman, I., & Suryani, D. (2022). Implementasi KIP dan tantangan ketepatan sasaran di sekolah menengah pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 51–66.
- Rini, P. P., Muhyidin, A., & Atikah, C. (2024). Peran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan tinggi (studi kasus Universitas Salakanagara). *Metakognisi*, 6(2), 119-126.
- Sari, D. A. (2021). Analisis efektivitas penyaluran dana program Indonesia Pintar di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 23–31.
- Sari, D. R., & Rahmawati, E. (2021). Efektivitas program Indonesia Pintar dalam menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 110–124.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhada, A. (2024). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan (Studi Di SDN Tonjong 1). *Jurnal Administrasi Publik Riset Inovatif*, 1(1), 64-74.
- Sukmadinata, N. S. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.